



## POLITIK EKOLOGI : KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR ROB DI PEKALONGAN

Herlina Muzanah Zain<sup>1</sup>, Iqbal Aidar Idrus<sup>2</sup>,  
Angella Rosha Pangestu<sup>3</sup>, Madi Ramadhan<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[herlina.zain@uta45jakarta.ac.id](mailto:herlina.zain@uta45jakarta.ac.id)

### Abstrak

Studi ini tentang strategi penanganan banjir rob di kawasan pantai pesisir pekalongan melalu berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam peraturan hingga bentuk kerjasama dengan berbagai stakeholder. Banjir rob yang sampai saat ini masih terjadi menjadi kekuatan lahirnya kebijakan-kebijakan baru. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan dalam penanganan banjir rob. Pendekatan kualitatif Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dari literatur reviewe, kajian dokumen pemerintahan dan artikel-artikel lainnya yang relevan sebagai desain penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan banjir rob dipengaruhi oleh faktor lemahnya penegakan hukum dalam pembuangan limbah batik yang mencemari lingkungan yang dianggap memperburuk banjir rob, belum sinkronisasi dengan kebijakan pendukung lainnya. Pemerintah daerah belum secara tersinkronisasi dengan kebijakan pendukung yang lainnya dalam rangka percepatan penanganan banjir rob, seperti pemkot melakukan pembanguna besar-besaran ditengah usaha mereka mengatasi banjir rob. Peningkatan pemahaman bersama baik pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan karena banjir rob juga disebabkan oleh faktor perubahan iklim yang tidak lain diakibatkan ulah manusia.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, kebijakan, banjir rob.

### Abstract

*This study is about the strategy for dealing with tidal flooding in the Pekalongan coastal area through various good policies contained in regulations and forms of cooperation with various stakeholders. Tidal floods, which are still occurring today, have become the driving force for the birth of new policies. This study aims to find out the main causes of the failure of policy implementation in handling tidal floods. Qualitative approach Research using the method of collecting data from literature review, review of government documents and other relevant articles as a research design. The results of this study indicate that the policy for handling tidal floods is influenced by the factor of weak law enforcement in disposing of batik waste which pollutes the environment which is considered to exacerbate tidal floods, not yet synchronizing with other supporting policies. The regional government has not been synchronized with other supporting policies in order to accelerate the handling of tidal floods, such as the municipal government carrying out large-scale developments in the midst of their efforts to deal with tidal floods. Increasing mutual understanding between the government and the community to protect the environment together because tidal floods are also caused by climate change factors which are nothing but human activities.*

**Keywords:** Local government, policy, tidal floods.

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terletak di wilayah pesisir dengan topografi landai, dan menjadi daerah yang sangat rawan terhadap kenaikan muka air laut. Keadaan ini tentu saja berbeda dengan topografi pantai selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa letak geografis Kabupaten Pekalongan sangat rentan terhadap pemanasan global. Tingginya skor kerentanan tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan berupa pantai berpasir dan erosi pantai (Marfai, 2011).

Berdasarkan topografi, keadaan ini mempersulit pengaturan saluran drainase, karena kemiringan lahan relatif rendah. Akibatnya, beberapa wilayah Kota Pekalongan sering dilanda banjir, sedangkan di sebelah utara pesisir Kota Pekalongan yang berdekatan, perampokan juga lebih sering terjadi di daerah yang tergenang. Tantangan lain dalam menghadapi banjir rob di Kota Pekalongan adalah penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan kenaikan muka air laut (*sea level rise*) (Sauda & Nugraha, 2019).

Dinamika banjir pesisir (termasuk banjir air laut pasang atau rob) di Pekalongan, baik wilayah Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan, sangat kompleks karena sudah terjadi bertahun-tahun dan dampaknya meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Frekuensi kejadian banjir pesisir semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai lebih dari 9 kali setahun dengan ketinggian banjir di atas 0,5 meter bahkan di beberapa tempat mencapai di atas 1 meter. Oleh karena itu diperlukan penanganan teknis infrastruktur untuk mengurangi frekuensi, luasan dan tinggi genangan.

Permasalahan banjir rob terjadi di 3 (tiga) kecamatan kota Pekalongan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan yaitu, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Krapyak, Kecamatan Degayu, Kecamatan Pasir kraton Kramat, Kecamatan Tirto, Kecamatan Pringrejo, Desa Kauman dan Desa Klego. Daerah yang masih terkena banjir rob adalah daerah di pantai utara dan sekitar sungai Bremsi, Meduri, Kupang (Kali Loji), Banger dan Gabus.

Banjir Rob banyak disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu Pertumbuhan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap ketinggian tanah di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan tanah menjadi lebih datar sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, terdapat beberapa penyebab banjir rob di Kota Pekalongan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Penyebab Banjir Rob

No.	Faktor Penyebab Banjir Rob	Keterangan
1.	Kondisi Geografis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topografi Wilayah Rendahnya suatu wilayah memiliki tingkat kerentanan pada bencana banjir rob.</li> <li>2. Penurunan Tanah Disebabkan oleh adanya beban bangunan dan peningkatan pengambilan atau pemompaan air tanah yang berakibat pada turunnya permukaan tanah.</li> </ol>
2.	Kondisi Sosial, dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drainase Sistem drainase yang tidak baik. Sehingga terjadi genangan banjir rob yang panjang</li> <li>2. Pemukiman Padat Terpenuhinya luas area oleh bangunan, menyebabkan kawasan tersebut menopang beban bangunan.</li> <li>3. Kepadatan Penduduk Pertambahan penduduk yang meningkat mempengaruhi kebutuhan akan lahan dan air bersih.</li> </ol>

Sumber: diolah oleh penulis (Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022))

Banjir rob menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat sekitar. Dampak ekonomi, kesehatan hingga aspek sosial dirasakan oleh masyarakat setempat. Banjir rob berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Banjir rob juga berdampak pada kesehatan masyarakat, dimana penyebaran penyakit akibat kondisi lingkungan buruk sehingga berakibat pada memburuknya kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih juga menjadi terbatas.

Banjir di pesisir Pekalongan merupakan isu lintas wilayah administrasi yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki wewenang yang krusial. Sebagai implikasinya, kebijakan yang diambil tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintah kabupaten/ kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sementara isu bencana iklim telah menjadi perhatian pemangku kepentingan di berbagai tingkat, maka banjir di pesisir Pekalongan dapat menjadi isu dalam kerjasama multipihak dalam bidang perubahan iklim.

Jika tidak ada kebijakan penanganan yang signifikan, luasan dan risiko banjir diperkirakan akan meluas dan meningkat, dimana 42 desa/kelurahan akan memiliki risiko

banjir tinggi dan sangat tinggi, dengan estimasi luasan genangan di wilayah tersebut mencapai 5.700 ha pada tahun 2035. Bahkan beberapa desa /kelurahan diperkirakan akan tergenang permanen.

Strategi penanganan Banjir rob harus dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari Kebijakan, Kolaborasi Stakeholder dan Sikronisasi. Mulai dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009–2029 sebagai tuntutan atas perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan nasional.

Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2019, antara lain (1) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang, (2) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang, (3) Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, (4) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petang long sistem Kali Boyountuk, dan terbaru (5) Tahun 2021 Pemerintah Kota Pekalonga sedang memulai program mitigasi banjir berupa pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Kolaborasi stakeholder telah dilibatkan mulai dari akademisi, LSM maupun pihak lain. Penanganan banjir juga telah melibatkan pihak akademisi mulai dari Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyakterlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan Massachusetts Institute of Technology(MIT)dari Amerika Serikat. Pada 2020 silam, juga telah bekerja sama dengan LSM BINTARI Foundation dan Pemerintah Kota Pekalongan telah berhasil mengadakan program Pembangunan MCK Adaptif sebagai upaya terkait permasalahan sanitasi yang terjadi di wilayah Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara.

Namun, realitas yang ada banjir rob masih terjadi wilayah pesisir pantai pekalongan. Salah satu isu strategis RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 terkait dengan penanggulangan banjir rob serta pengendalian kualitas lingkungan. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan didukung dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun dan meninggikan tanggul raksasa di kawasan pesisir setiap tahun. Menurut Laporan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, upaya yang dilakukan masih banyak celah, dan sejauh ini luasan banjir masih 38,28% dari luas Kota Pekalongan.

Persoalannya selama ini lebih kepada upaya pengimplementasian dari kebijakan untuk mengatasi banjir rob tidak berjalan dengan baik. Seperti masalah banjir rob yang terjadi setiap tahunnya menjadi perhatian karena berdampak nyata bagi kondisi kesehatan

dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, studi ini membahas apa yang menjadi penyebab tidak berjalannya penanganan banjir rob di Kota dan Kabupaten Pekalongan.

### 3. TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Ekologi Politik

Sebagai ranah studi, ekologi politik dikaitkan dengan tingkah laku pengguna sumber daya dalam pengaturan spesifik dengan politik, institusi, dan hubungan sosial yang merupakan pengaturan pada tingkah laku tersebut. Pada sisi lain, Cockburn dan Ridgeway (1979) menggambarkan ekologi politik sebagai tujuan terselubung yang dilakukan negara-negara industri untuk dapat mengeksploitasi lingkungan yang mengakibatkan adanya rakitan ilmu sosial politik, ekonomi, dan ekologi.

Ekologi politik, antara lain mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup; menggambarkan kaitan dan hubungan yang terjalin antara masyarakat dan lingkungan hidupnya yang digambarkan melalui akses dan kontrol sumber daya alam dan memengaruhi keberadaannya di masa depan; dan merupakan kaitan erat ilmu ekologi dan ekonomi politik (Hempel, 1996)

#### b. Kebijakan

Kebijakan kemudian mulai diterapkan. Implementasi adalah proses yang selalu berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan apa yang diminta kebijakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Menurut Waab (2004: 36), implementasi kebijakan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah persiapan kebijakan. Ini dimulai dengan menyusun agenda, yang biasanya berisi daftar masalah yang harus diperhatikan. Tahap kedua adalah pelaksanaan program. Tahap ini mengatasi atau mengurangi masalah agar tidak terjadi lagi. Ini dapat digambarkan sebagai suatu proses, suatu luaran (output), atau bahkan hasil akhir. Sebagai proses, implementasi adalah istilah yang mengacu pada kumpulan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menghasilkan hasil segera. Secara luaran, implementasi mengacu pada cara-cara yang telah digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada akhirnya, implementasi mengacu pada perubahan tertentu yang terjadi pada masalah yang menjadi target kebijakan; (3) tahap ketiga adalah evaluasi kebijakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Tahap evaluasi merupakan bentuk lain dari mengawasi implementasi kebijakan agar sesuai pada jalur yang ditentukan sejak awal, serta

bertujuan mempersoalkan apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang diekspektasikan untuk terjadi saat perumusan kebijakan. Tahap ini juga lebih mudah dikatakan sebagai tahap pengawasan kebijakan.

#### **4. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif (Suryabrata, 2019: 76) dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2007:6). Melalui pendekatan kualitatif dapat menganalisis lebih dalam terhadap peranan para pihak (stakeholder) dalam pelaksanaan kebijakan penanganan banjir Rob di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi menggunakan artikel ilmiah yang relevan, dokumen pemerintah dan kajian-kajian ilmiah lainnya sebagai pendukung dalam tulisan ini.

#### **5. PEMBAHASAN**

Dalam konteks ini, evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja suatu implementasi. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan berakhir (Nugrohi, 2002:665). Ketertiban umum tidak bisa begitu saja diliberasasi. Kebijakan tersebut harus dipantau dan referensi dibuat untuk mekanisme pemantauan tersebut penilaian politik. Tujuan evaluasi biasanya untuk menilai ruang lingkup Efektivitas kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dapat dicapai dan penilainya diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2002:669).

##### **Penegakan Hukum Yang Lemah**

Aktivitas Industri batik pekalongan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Pekalongan. Melalui sektor Perdagangan memberikan sumbangan tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan yaitu sebesar 22,72%, sementara sektor Industri Pengolahan yang sebagai sektor unggulan penunjang perekonomian sebesar 21,43%. Kontribusi tersebut memberikan dampak pada nilai PDRB Kota Pekalongan yang tercatat pada tahun 2017 PDRB Kota Pekalongan dengan perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 9,28 triliun rupiah meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 8,50 triliun rupiah. (Sumber: DPMPSTSP Kota Pekalongan)

Keberhasilan ekonomi harus seimbang dengan indeks lingkungan, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah indeks ekonomi berbanding terbalik dengan indeks

lingkungan. Kondisi ekonomi masyarakat khususnya pelaku industri batik meningkat akibat penjualan batik yang meningkat, akan tetapi kondisi lingkungan semakin menurun. Kontribusi industri batik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan, membuat semangat untuk terus meningkatkan hasil produksi batik. Namun, aktivitas bisnis industri batik ternyata memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Pembuangan limbah batik ke sungai mengakibatkan pencemaran sungai. Pencemaran sungai akibat limbah batik dianggap memperparah banjir rob di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Kewajiban pengelolaan limbah juga sudah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah di Kota Pekalongan juga menjelaskan mengenai tata kelola air limbah, yakni dengan menggunakan IPAL. Hal tersebut tercantum pada Pasal 4 ayat 1, yaitu Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang air limbah wajib memiliki IPAL, guna mengolah air limbahnya agar sesuai dengan baku mutu air limbah. Peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan air limbah sangat penting, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pengusaha industri batik yang membuang limbah langsung ke sungai.

Pengelolaan dalam limbah batik daerah ini menjadi kelemahan didalam pelaksanaan kebijakan penangan Banjir Rob. Sudah tidak menjadi rahasia umum dengan banyaknya industri-industri batik yang membuang limbah kesungai sampai hari ini dan tidak tersedianya IPAL dari pemerintah yang memadai maka dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat tentang kondisi sungai di pekalongan dan potensi banjir rob.

Sehingga pendekatan- pendekatan seperti sosialisasi menjadi sebuah pilihan didalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam mendirikan suatu bangunan adalah dengan memperkuat dasar bangunan terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah daerah, sebelum jauh terjun ke lapangan dalam proses implementasi kebijakan melalui peraturan daerah yang diidentifikasi terlebih dahulu adalah kondisi masyarakat sekitar yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan sekitar.

Di dalam masyarakat pekalongan yang didominasi oleh pengusaha batik harus diidentifikasi kondisi dan kenyataan yang terjadi, karena tidak bisa di pungkiri di internal masyarakat sebagai masyarakat lokal oleh karena itu harus ada pengerucutan yang

dilakukan dengan metode yang dapat mempersatukan pandangan untuk sama-sama memaksimalkan kebijakan guna untuk penanganan banjir rob.

Selain limbah batik, sebagai kota dengan berbagai macam industri mulai dari industri batik, peternakan dan perhotelan, Pekalongan membutuhkan banyak pasokan air. Kota Pekalongan memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Ini menjadi masalah ketika air tanah adalah satu-satunya solusi, karena pengambilan air tanah yang berlebihan mempercepat penurunan muka tanah. Tanah yang lebih rendah dan permukaan laut yang lebih tinggi menyebabkan air laut mengalir dan menutupi daratan yang lebih rendah.

Beberapa pemerintah daerah lainnya juga telah memberlakukan pajak atas penggunaan air tanah, yang merupakan kompensasi atas kerusakan alam. Pajak air tanah sebesar 20% ini dapat mengurangi kebutuhan air tanah dan memperlambat bahkan menghentikan kerusakan alam. Namun, muncul keraguan publik terkait penggunaan pajak air bawah tanah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan penggunaan pajak air bawah tanah yang benar, sesuai dengan tujuan utamanya. Diharapkan pajak penggunaan air tanah dapat dioptimalkan untuk mengurangi penggunaan air tanah, mencari kompensasi air murni lain sebagai pengganti air tanah, serta mengurangi dan memperbaiki dampak ekologis akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, terutama untuk mengurangi penurunan tanah.

### **Kebijakan Pembangunan**

Salah satu faktor penyebab pada banjir rob yaitu penurunan tanah akibat penggunaan pompa air tanah dan peningkatan pembangunan. Ditengah-tengah permasalahan banjir rob yang belum terselesaikan baik di wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan tidak diimbangi dengan resiko kerentanan pada pembangunan baru.

Melalui Pemerintah Kota Pekalongan melakukan pembangunan pada aspek pariwisata yaitu pembangunan obyek wisata air terbesar yang berada pada wilayah pantai pasir kencana. pembangunan objek wisata yang berada di Pantai Pasir Kencana, yang akan rampung pada akhir 2021. pembangunan wisata air ini dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) senilai Rp30 miliar. Pembangunan obyek wisata tersebut disinyalir dapat menjadi alternatif daya tarik para

wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pekalongan, selain untuk wisata budaya batik dan wisata religi.

Kebijakan penanganan banjir rob tidak disertai dengan kebijakan pendukung lainnya. Disaat harusnya memperhatikan aspek pembangunan disekitar pesisir pantai namun Pemkot Pekalongan justru melakukan pembangunan besar-besaran. Hal ini dinilai sebagai bentuk tidak tersinkronisasi dengan baik dengan kebijakan yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan wisata air tersebut justru dikhawatirkan akan menimbulkan zonasi penurunan muka tanah secara lebih serius dan memperparah dampak banjir rob.

Hal ini sesuai dengan sudut pandang pendekatan ekologi politik yaitu mengeksplorasi berbagai kepentingan yang muncul dalam pengelolaan kebijakan tentang lingkungan. Perbedaan kepentingan menjadikan tidak adanya satu pengertian yang tetap, karena masing-masing aktor didefinisikan berdasarkan kepentingannya.

Manajemen lingkungan tentunya memiliki dimensi dan implikasi politis, di mana pemangku kepentingan seperti badan pemerintah dan perusahaan memiliki kekuasaan dan modal untuk menentukan pola dan arah penggunaan sumber daya alam, sementara masyarakat menjadi pihak yang paling rentan dan menderita dampak yang dihasilkan. Manajemen lingkungan hidup menjadi ajang persaingan kepentingan politik dari peran, pengaruh, dan kepentingan dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya (Arifin, 2012; Srinivasan & Kasturirangan, 2016)

Perbedaan kepentingan melahirkan kebijakan yang tidak sinkronisasi sedangkan kebijakan yang dikembangkan haruslah transformatif dan adaptif. Kebijakan yang transformatif didorong untuk membangun strategi dan langkah adaptif yang kolektif dan inovatif dari berbagai aktor serta mengisi gap koordinasi yang selama ini terjadi. Transformasi haruslah menjadi proses yang terencana dengan baik yang menitikberatkan pada pemicu potensi risiko, memperhitungkan ambang batas sosial dan ekologis, perubahan dan efek yang diperlukan, serta juga dinamika tata kelola, untuk memastikan kesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan dan disertai dengan kebijakan pendukung yang lain yang sinergi dan menjalin sinkronitas.

### **Politik Ekologi**

Banjir rob di pantai utara Jawa merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut, dan aktivitas manusia berupa eksploitasi air tanah yang berlebihan yang menyebabkan penurunan muka tanah. Upaya penanggulangan banjir rob di pantai utara Jawa memerlukan integrasi dan

kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mengubah sikap masyarakat terhadap bencana, menetapkan kebijakan yang tepat dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pendekatan politik ekologis ini adalah salah satu cara untuk memahami hubungan manusia-lingkungan, yang muncul di tahun 70-an tapi baru dikembangkan sebagai cara berpikir baru di Indonesia Di akhir 1980-an. Perspektif baru dalam memahami masalah lingkungan sangat dipengaruhi oleh pemikiran neo-Marxis keterbelakangan sebagai bentuk kritik pada pendekatan Malthusian dan ekologi budaya (pendekatan sistematis) selama ini. Karena, Perspektif politik ekologis ini lebih menekankan analisisnya adalah tidak ada masalah lingkungan disebabkan oleh masalah internal lingkungan, tetapi lebih kepada penyebabnya pengaruh luar, yaitu tekanan politik dan ekonomi (Arifin, 2015).

Sangat berbeda dari ide itu konsekuensi menurut sudut pandang politik ekologi model hubungan manusia dengan alam (destruktif atau berkelanjutan) kehadiran memiliki dampak yang lebih besar entri yang dibuat oleh kelompok tertentu yang kemudian disahkan sebagai “kebenaran”. Ini berbeda pandangan ahli lingkungan sebelumnya lebih mementingkan hubungan antara manusia dan alam lebih karena tekanan internal hubungan itu sendiri, seperti tekanan penduduk (Malthusian) dan masalah teknis yang mendalam pemeliharaan (penggunaan dan penyimpanan)

Ekologi Politik adalah alat analisis yang dapat membantu di sini. Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa risiko bencana muncul dan bagaimana pengelolaannya. Selain itu, kita melihat bagaimana konteks politik dilihat sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, mulai dari tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Analisis politik ekologi ini lebih menekankan bahwa isu lingkungan bukan hanya disebabkan oleh faktor internal di dalamnya, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik dan ekonomi dari luar, termasuk kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) (Muharram, 2022). Persoalan mengenai pola hubungan manusia dengan lingkungan bukanlah permasalahan kepadatan penduduk atau sistemik (ekologi budaya), tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmerataan (ketimpangan) dan tekanan kekuasaan. Oleh karena itu, politik ekologi mengarahkan pandangannya bahwa kerusakan lingkungan disebabkan tidak hanya oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang bersifat global (makro) (Satria, 2007; Satira, 2009).

Faktor banjir rob juga disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut juga disebabkan oleh perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan iklim sebagai fenomena global membatasi sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dan beradaptasi dengan perubahan tersebut dalam menghadapi potensi ancaman melalui pengembangan pengetahuan dan aplikasi kebijakan yang sesuai.

Pemanasan global telah menyebabkan kenaikan muka air laut dan merupakan salah satu faktor penyebab banjir rob di kota Pekalongan. Selain itu, penurunan muka tanah disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangunan industri dan pengambilan air tanah yang berlebihan permukaan dan memperparah banjir pasang surut. Hilang kapasitas masyarakat dan tata kelola yang baik kemudian Pekalongan ditetapkan sebagai daerah rawan banjir rob.

Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim maka diperlukan hubungan antara manusia dengan lingkungan untuk saling menjaga dan berperan serta untuk beradaptasi dengan adanya permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global. Selain itu diperlukan multi kebijakan perubahan iklim serta interaksi vertikal Pemerintah dengan aktor-aktor lainnya sehingga melibatkan multi governance dan multi kebijakan yang lahir sebagai pendukung dari kebijakan penanganan banjir rob yang telah ada.

### **Penguatan Civil Society**

Masyarakat sipil adalah ruang yang diciptakan oleh masyarakat untuk integrasi dan interaksi sukarela, untuk menanggapi kehidupan sosial dan untuk bertindak secara independen dan otonom, sebagai pembatas dan penyeimbang dari kebijakan negara yang dirancang secara dinamis. Masyarakat sipil harus berpartisipasi sebagai bagian dari masyarakat sipil non-negara yang bekerjasama untuk mengendalikan banjir di kota Pekalongan. Kehadiran masyarakat sipil memiliki potensi atau keunggulan yang dapat membantu mendinamisasikan kerja sama pengendalian banjir rob Kota Pekalongan.

Berdasarkan data, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses implementasi kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan negara harus masuk ke langsung masyarakat, artinya melibatkan langsung subjek utamanya. Dalam proses sosialisasi kebijakan ini pemerintah harus melakukan dengan cara-cara terbuka agar dapat meyakinkan masyarakat. Walaupun tidak ada perintah dari atasan, akan tetapi sosialisasi yang terbuka memberikan ikatan rasa tanggungjawab dan kewajiban ini sedikit banyaknya akan memberikan dampak yang

signifikan terhadap pelestarian dan perlindungan hutan negara dalam mempertahankan cakupan luas hutan.

Selain, tersedianya kebijakan maupun peraturan dalam penanganan banjir rob juga diperlukan penguatan dari kelompok masyarakat baik dalam hal teknis maupun non teknis. Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam penanganan banjir rob . Saat ini terdapat 40 komunitas yang telah bergabung dan untuk ikut kampanye dan aksi atas dampak perubahan iklim dan banjir rob di Kota Pekalongan.

Masyarakat sipil sebagai bagian dari masyarakat sipil non-pemerintah harus berpartisipasi dalam kerjasama dalam pengelolaan banjir rob di kota Pekalongan. Kehadiran gerakan rakyat kolektif memberikan peluang kota Pekalongan untuk tampil lebih kuat mengatasi bencana banjir rob. Kehadiran masyarakat sipil memiliki potensi atau keuntungan untuk membantu membuat kerjasama penanganan banjir rob Kota Pekalongan lebih dinamis.

Organisasi masyarakat sipil di Kota Pekalongan terlibat dalam kegiatan seperti pengurangan risiko bencana, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta kegiatan dan kampanye perlindungan lingkungan. Masyarakat di Kota Pekalongan bersatu untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi perampokan dengan berbagi sumber daya yang diperlukan.

Sumber daya yang diberikan bersifat fisik maupun non fisik, seperti tenaga, program, gagasan, advokasi, bantuan peralatan penunjang infrastruktur, dll. Berbagai sumber daya yang terkumpul dapat menjadi potensi merepresentasikan kekuatan masyarakat sipil dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghadapi permasalahan.

## 6. KESIMPULAN

Permasalahan Banjir Rob di Pekalongan merupakan permasalahan belum terselesaikan. Dalam kasus Banjir Rob terdapat hal penting yang menjadi penyebab Banjir Rob belum dapat terselesaikan. Penyebabnya antara lain: Pertama, Lemahnya penegakan hukum pada pengelolaan limbah batik; kedua, Pembangunan yang masih berjalan di pesisir pantai; Ketiga, fenomena belum tersinkroniasi satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor tersebut merupakan dampak dari tidak berjalannya kebijakan penanganan banjir rob di Pekalongan, adapun kebijakan tersebut telah tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 yang merupakan salah satu langkah politik ekologi di Daerah dan peraturan daerah maupun kebijakan pendukung lainnya

Penguatan Civil Society dan pengawasan pada izin pembangunan maupun pembuangan limbah produksi batik harus diberikan kebijakan yang tegas agar khususnya pembuangan limbah batik tidak mencemari lingkungan sehingga tidak memperburuk kondisi saat banjir rob. Hal ini juga menjadi perhatian khusus selain kebijakan – kebijakan yang lainnya dalam penanganan banjir rob. Langkah ini dianggap efektif karena tindak lanjut dari kebijakan ini adalah memberikan tanda keseriusan pemerintah dan semua elemen termasuk masyarakat, pelaku industri dalam strategi penanganan banjir Rob di Pekalongan

## REFERENSI

- Arifin, Z. (2012). Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembetulan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. Edisi 1, Tahun I. Colfer, C., N. Peluso, dan SC Chin. (1997). Melampaui tebas dan bakar: membangun adat pengelolaan hutan hujan tropis Kalimantan.
- Cockburn, A. & Ridgeway, J. (1979). *Political Ecology*. New York: Times Book.
- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 144-151.
- Hempel, L. C. (1996). *Environmental Governance: The Global Challenge*. Island Press
- Marfai, M.A. 2011. "The hazard of coastal erosion in Central Java Indonesia: an overview". *GEOGRAFIA, Malaysia Journal of Society and Space*, 7(3), 1 – 9
- Miftakhudin, S. (2021). Strategi penanganan banjir rob kota pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 19(1).
- Muharram, S., Fadly, D. A., Pebriandini, R., & Nabila, F. (2022). Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kabupaten Banjar. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 7, No. 1).
- Moleong, Lexy, J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung.
- Policy Brief Bangkit Dari Banjir Di Pekalongan: Kebutuhan Kebijakan Transformatif. IAP Jawatengah.

Ramadhani, S. Z. (2022). *Kolaborasi Pemerintah Kota Pekalongan Dan Civil Society Dalam Penanganan Banjir Rob Pada Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Sauda, R. H., & Nugraha, A. L. (2019). Kajian pemetaan kerentanan banjir rob di kabupaten pekalongan. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 466-474.

Satria A. (2007). *Ekologi Politik dalam Ekologi Manusia*. Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor

Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.

Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022). Analisis Penyebab Banjir Rob di Kawasan Pesisir Studi Kasus: Jakarta Utara, Semarang Timur, Kabupaten Brebes, Pekalongan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 16-28.

Suryabrata, S. (2019). *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Perkasa.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Website:

<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2023/01/03/diskusi-eksternal-egsa-bersama-icci-ugm-menyelidik-imbas-perubahan-iklim-terhadap-kenaikan-muka-air-laut-dan-banjir-rob-di-pesisir-utara-jawa/>